

**ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE ABSORPTION OF THE
OPD EXPENDITURE BUDGET IN JAMBI PROVINCE 2018-2019
WITH SILPA AS A MODERATING VARIABLE**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SERAPAN
ANGGARAN BELANJA OPD DI PROVINSI JAMBI TAHUN 2018-2019
DENGAN SILPA SEBAGAI VARIABEL MODERATING**

Nadira Indah WT¹⁾

Yudi²⁾

Andi Mirdah³⁾

¹⁾ Alumni Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi Tahun 2021,
Jambi-Indonesia

^{2&3}Dosen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Jambi-
Indonesia

Email: nadiratoreh@yahoo.co.id¹⁾, yudi_fe@unja.ac.id²⁾, andi_mirdah@unja.ac.id³⁾

ABSTRACT

The budget has a function as a planning tool, a control tool, and a fiscal policy tool. Absorption of budget in this case is the ability of the regional government to realize a number of budgets that have been set together with the legislature (DPRD) in Regional Government Budget (APBD) which is stated on an ordinal scale.

The purpose of this research is to see the effect of regional financial regulations, the process of procuring goods and services, the bureaucratic environment, and organizational commitment to budget absorption with financial surplus (SILPA) as a moderating variable in Jambi Province.

This type of research used in this study uses a quantitative approach using statistical techniques. The population in this study amounted to 41 in the Regional Organization unit (OPD) Jambi Provincial Government. Sources of data used in this study use primary data using a questionnaire instrument. This study uses multiple linear analysis to analyze statistics and regression models that have previously been tested in the classical assumption test, while for testing the moderating variables using the residual test.

The results of this study indicate that regional financial regulations, the process of procuring goods and services, the environment of bureaucratic, and organizational commitment simultaneously have a positive effect on OPD budget absorption in the Jambi Provincial

Government which means when regional financial regulations, the process of procuring goods and services, the bureaucratic environment, and organizational commitment, these variables will be able to increase budget absorption. The results of this study indicate that regional financial regulation variables have a positive effect on OPD budget absorption in Jambi Province. Meanwhile, the variables of the process of procuring goods and services, bureaucratic environment, and organizational commitment have no effect on OPD budget absorption in Jambi Province.

Keywords: Budget Absorption, Regional Financial Regulation, Procurement Process of Goods and Services, Environment of Bureaucratic, Organizational Commitment

ABSTRAK

Anggaran memiliki fungsi sebagai alat perencanaan, alat pengendalian, dan sebagai alat kebijakan fiskal. Serapan anggaran dalam hal ini adalah kemampuan Pemda untuk merealisasikan sejumlah anggaran yang sudah ditetapkan bersama lembaga legislatif (DPRD) di dalam APBD yang dinyatakan dalam skala ordinal.

Tujuan dari penelitian ini untuk melihat pengaruh regulasi keuangan daerah, proses pengadaan barang dan jasa, lingkungan birokrasi, dan komitmen organisasi terhadap serapan anggaran dengan SILPA sebagai variabel moderating di Provinsi Jambi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan teknik statistik. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 41 pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jambi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dengan menggunakan instrumen kuesioner. Penelitian ini menggunakan analisis linear berganda untuk menganalisis statistik dan model regresi yang sebelumnya telah diuji dalam uji asumsi klasik sedangkan untuk pengujian variabel moderating menggunakan uji residual.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi keuangan daerah, proses pengadaan barang dan jasa, lingkungan birokrasi, dan komitmen organisasi secara simultan berpengaruh positif terhadap serapan anggaran OPD pada Pemerintah Provinsi Jambi yang artinya ketika regulasi keuangan daerah, proses pengadaan barang dan jasa, lingkungan birokrasi, dan komitmen organisasi maka variabel-variabel tersebut akan mampu meningkatkan serapan anggaran. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel regulasi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap serapan anggaran OPD di Provinsi Jambi. Sedangkan Variabel proses pengadaan barang dan jasa, lingkungan birokrasi, dan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap serapan anggaran OPD di Provinsi Jambi.

Kata Kunci: Serapan Anggaran, Regulasi Keuangan Daerah, Proses Pengadaan Barang dan Jasa, Lingkungan Birokrasi, Komitmen Organisasi

1. PENDAHULUAN

Pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam mengoptimalkan pengelolaan daerah untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Peran pemerintah sangat penting untuk memberikan dorongan yang kuat dalam melakukan pergerakan perekonomian. Peran pemerintah disini dapat dinyatakan dalam bentuk mengoptimalkan pengelola potensi daerah dan lapangan kerja yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal tersebut dapat terlaksana jika segala sesuatunya dilakukan secara efektif dan efisien. Namun kenyataannya masih banyak hal yang diharapkan oleh masyarakat terhadap pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan yang tidak terpenuhi. Hal ini terjadi karena adanya faktor yang dapat mempengaruhi rendahnya serapan anggaran. Pertama, adanya ketakutan yang berlebihan (dampak hukum) dari masing-masing aparatur. Kedua, sejumlah institusi banyak yang tidak

memiliki konsep perencanaan yang matang, jelas, dan terukur. Ketiga, kurangnya pemahaman aparatur diberbagai institusi terkait dengan mekanisme penggunaan anggaran dan model pertanggungjawaban. (Handayani : 2015)

Anggaran memiliki fungsi sebagai alat perencanaan, alat pengendalian, dan sebagai alat kebijakan fiskal. Anggaran sebagai alat perencanaan untuk mencapai tujuan yang diciptakan oleh pemerintah. Anggaran sebagai alat pengendalian untuk memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Sedangkan anggaran sebagai alat kebijakan fiskal untuk membantu pemerintah dalam menstabilkan ekonomi dan mendorong laju pertumbuhan. (Mardiasmo, 2009)

Menurut Arniwita, dkk (2019). Ada beberapa faktor yang menjadi indikator yang dirujukan sebagai permasalahan yang mempengaruhi serapan belanja OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi yang salah satunya menunjukkan bahwa kapasitas SDM berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap serapan anggaran belanja pada Pemerintah Provinsi Jambi. Apabila pengalokasian anggaran dilakukan secara efisien, walaupun adanya keterbatasan sumber dana, negara masih dapat mengoptimalkan pendanaan pada kegiatan strategis lainnya. Dalam penelitian Priatno (2013) menemukan faktor perencanaan dan pengadaan barang dan jasa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap serapan anggaran pada Satuan Kerja (Satker). Heriyanto (2012) menyebutkan faktor utama yang mempengaruhi penyerapan anggaran belanja di Kementrian/Lembaga yaitu faktor perencanaan, faktor administrasi, faktor sumber daya manusia, faktor dokumen pengadaan, dan faktor ganti uang persediaan. Melihat latar belakang dan perbedaan hasil penelitian diatas yang tidak konsisten maka memberikan motivasi bagi saya dalam melakukan penelitian kembali mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi serapan anggaran OPD di Provinsi Jambi tahun 2018-2019 dengan SILPA sebagai variabel moderating.

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Serapan Anggaran

Anggaran menurut Mardiasmo merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, dan penganggaran merupakan proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Sementara itu, menurut Indra Bastian berpendapat anggaran merupakan paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang (Dalam Nordiawan, 2014).

2.2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 Ayat 8, mendefinisikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang sepenuhnya dilakukan dalam rangka untuk menjalankan roda pemerintahan daerah dengan maksimal.

APBD terdiri dari pendapatan anggaran dan hibah, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan yang merupakan instrumen utama kebijakan fiskal untuk mengarahkan perekonomian nasional dan menstimulus pertumbuhan ekonomi sehingga besarnya penyerapan akan berdampak pada semakin besarnya daya dorong terhadap pertumbuhan.

2.3. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 17-20, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah yang berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah Daerah. Dimulai dengan Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan rencana pemerintah daerah sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah (RAPBD) kepada DPRD. Pembahasan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPRD yang pengambilan keputusannya dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. APBD yang disetujui oleh DPRD terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.

2.4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Serapan Anggaran

Ada beberapa faktor yang hampir sama antara daerah satu dengan daerah lainnya, yaitu: regulasi keuangan daerah, proses pengadaan barang dan jasa, dan komitmen organisasi.

2.5. Regulasi Keuangan Daerah

Dalam suatu sistem regulasi keuangan daerah dibuat untuk mengendalikan pelaksanaan keuangan daerah agar segala tindakan atas pengendalian tersebut dapat di tetapkan dalam peraturan. Namun dalam reformasi di bidang keuangan daerah tidak konsistennya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atas pengelolaan keuangan daerah merupakan faktor utama lambatnya akuntabilitas keuangan daerah.

2.6. Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Dalam rangka mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, di dalam Peraturan Presiden memberikan mandat pengadaan barang dan jasa menggunakan layanan pengadaan secara elektronik untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Dengan diterapkannya pengadaan secara elektronik akan memberikan keuntungan bagi pengguna maupun penyedia lelang.

2.7. Lingkungan Birokrasi

Eisenstadt (1959) menyatakan bahwa, Birokrasi merupakan alat atau mekanisme yang dibuat untuk kesuksesan dan efisiensi suatu pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Birokrasi dapat dipandang sebagai sebuah lembaga rasionalitas dan implementasi yang efisien dari tujuan dan penyediaan. Penyediaan barang dan jasa seringkali terkendala dengan alasan birokrasi dalam realisasi sehingga anggaran yang sudah ada dialokasikan sehingga untuk penyediaan barang dan jasa pemerintah tidak terserap. Lingkungan birokrasi yang baik akan membuat pelaksanaan kegiatan operasional menjadi lancar. Namun, jika lingkungan birokrasi tidak mendukung kegiatan organisasi maka akan menghambat kinerja organisasi.

2.8. Komitmen Organisasi

Menurut Allen dan Meyer (dalam Handayani (2015)), mendefinisikan komitmen organisasi sebagai suatu kelekatan afeksi atau emosi terhadap organisasi seperti individu melakukan identifikasi yang kuat, memilih keterlibatan tinggi, dan senang menjadi bagian dari organisasi. ada tiga Dimensi komitmen organisasi adalah:

- a. Komitmen afektif (*affective comitment*) merupakan keterikatan emosional karyawan dan keterlibatan dalam organisasi
- b. Komitmen berkelanjutan (*continuence commitment*) merupakan komitmen berdasarkan kerugian yang berhubungan dengan keluarnya karyawan dari organisasi. Hal ini terjadi apabila karyawan tetap bertahan pada suatu organisasi karena membutuhkan gaji dan keuntungan lain.
- c. Komitmen normatif (*normative commiment*) Karyawan bertahan menjadi anggota organisasi karena adanya kesadaran bahwa komitmen terhadap organisasi merupakan hal yang seharusnya dilakukan.

2.9. SILPA

SILPA/SIKPA merupakan selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. (Standar Akuntansi Pemerintah). Peran pemerintah disini dinyatakan dalam bentuk mengoptimalkan pengelolaan potensi daerah dan sumber daya manusia yang memberikan manfaat terhadap masyarakat.

2.10. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Menurut Peraturan Menti Keuangan Nomor 8 Tahun 2010 pasal 1 ayat 18 tentang tata cara penyusunan laporan keuangan konsolidasian bendahara umum negara, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan

pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya selama satu periode. Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per 31 Desember telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

2.11. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan hipotesis penelitian yang telah dijelaskan, maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

- H.1 Regulasi keuangan daerah berpengaruh terhadap serapan anggaran pemerintah.
- H.2 Proses pengadaan barang dan jasa berpengaruh terhadap serapan anggaran pemerintah.
- H.3 Lingkungan birokrasi berpengaruh terhadap serapan anggaran pemerintah.
- H.4 Komitmen organisasi berpengaruh terhadap serapan anggaran pemerintah.
- H.5 Regulasi keuangan daerah, proses pengadaan barang dan jasa, lingkungan birokrasi, dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap serapan. anggaran pemerintah.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan teknik statistik. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari subjek atau objek penelitian yang mana bersumber dari kuesioner yang disebar pada responden. Penelitian ini akan melihat pengaruh regulasi keuangan daerah, proses pengadaan barang dan jasa, lingkungan birokrasi, dan komitmen organisasi terhadap penyerapan anggaran OPD di Provinsi Jambi.

Teknik penyebaran kuesioner ini dilakukan dengan cara membagikan kuesioner ke OPD di Provinsi Jambi. Responden diminta untuk menyatakan jawaban dari pernyataan dalam lima macam kategori jawaban, setiap jawaban akan mendapatkan nilai sesuai dengan arah pernyataan. Jawaban-jawaban tersebut masing-masing diberi skor: Untuk jawaban SS (Sangat setuju) diberi skor 5, Untuk jawaban S (Setuju) diberi skor 4, Untuk jawaban N (Netral) diberi skor 3, Untuk jawaban TS (Tidak Setuju) diberi skor 2, Untuk jawaban STS (Sangat Tidak Setuju) diberi skor 1. Populasi dalam penelitian ini adalah OPD yang ada di Provinsi Jambi dengan jumlah 41 OPD. Setiap OPD akan diberikan kuesioner kepada Kepala subbagian keuangan, staff subbagian keuangan dan subbagian yang berperan dalam proses penyusunan laporan keuangan OPD.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil

a. Sebaran Kuesioner Responden

Berdasarkan hasil yang didapat melalui penyebaran kuesioner yang dibagikan kepada responden yang menjadi sampel penelitian. Setiap responden menjawab 6 pertanyaan terkait identitas responden, 5 pertanyaan mengenai serapan anggaran, 6 pertanyaan mengenai regulasi keuangan daerah, 6 pertanyaan mengenai proses pengadaan barang dan jasa, 9 pertanyaan mengenai lingkungan birokrasi, 6 pertanyaan mengenai komitmen organisasi, dan 3 pertanyaan mengenai sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA). Dari 80 eksemplar kuesioner yang disebar hanya 74 kuesioner yang kembali dan dapat digunakan untuk diolah datanya.

Tabel 1. Jumlah Sebaran Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	80	100%
Kuesioner yang kembali	74	92,5%
Kuesioner yang tidak kembali	4	5%
Kuesioner yang ditolak	2	2,5%
Kuesioner yang dapat diolah	74	92,5%

Tingkat pengembalian kuesioner (<i>respon rate</i>): 74/80x100%=	92,5%
---	-------

Sumber: Data diolah peneliti

b. Statistik Deskriptif Usia Responden

Berdasarkan data penelitian yang diperoleh dari penyebaran kuesioner maka diperoleh data tentang umur responden yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Data Umur Responden

NO	Rentang Usia	Frekuensi	Persentase
1	20 – 29 Tahun	7	9,5%
2	30 – 39 Tahun	28	37,8%
3	40 – 49 Tahun	30	40,5%
4	Di atas 50 Tahun	9	12,2%
Total		74	100%

Sumber: Data Primer diolah (2020)

Dapat dilihat pada tabel bahwa terdapat 7 responden dengan persentase 9,5% yang berusia antara 20-29 tahun, 28 responden dengan persentase 37,8% yang berusia antara 30-39 tahun, 30 responden dengan persentase 40,5% yang berusia antara 40-49 tahun dan ada 9 responden dengan persentase 12,2% untuk yang berusia di atas 50 tahun. Dari data tersebut menunjukkan bahwasanya responden yang berusia antara 40-49 tahun lebih mendominasi dibandingkan responden pada kisaran usia yang lain. Dengan kisaran usia ini menunjukkan responden telak cukup memiliki pengalaman kerja sehingga dapat memberikan jawaban yang sesuai dengan pengalamannya.

c. Statistik Deskriptif Jenis Kelamin Responden

Berdasarkan data penelitian yang diperoleh dari penyebaran kuesioner maka diperoleh data tentang umur responden yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Data Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Pria	40	54%
Wanita	34	46%
Total	74	100%

Sumber: Data Primer diolah (2020)

Dapat dilihat pada tabel menunjukkan bahwa jumlah responden pria lebih banyak dibandingkan responden wanita, yakni 40 berbanding 34 atau sekitar 54% berbanding 46%.

d. Statistik Deskriptif Tingkat Pendidikan Responden

Berdasarkan data penelitian yang diperoleh dari penyebaran kuesioner maka diperoleh data tentang umur responden yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Data Tingkat Pendidikan Responden

Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
SMA/ Sederajat	4	5,4%
Diploma	1	1,4%
Sarjana (S1)	44	59,5%
Magister/Pasca Sarjana (S2)	17	22,8%
Doktor (S3)	1	1,4%
Tidak tercantum	7	9,5%
Total	74	100%

Sumber: Data Primer diolah (2020)

Dapat dilihat pada tabel menunjukkan bahwa terdapat 4 responden dengan persentase 5,4% yang memiliki tingkat pendidikan SMA/Sederajat, 1 responden dengan persentase 1,4% yang memiliki tingkat pendidikan Diploma, 44 responden dengan persentase 59,5% yang memiliki tingkat pendidikan Sarjana (S1), 17 Responden dengan persentase 22,8% yang memiliki tingkat pendidikan

Magister/Pasca Sarjana (S2), 1 responden dengan persentase 1,4% yang memiliki tingkat pendidikan dengan gelar Doktor (S3), dan 5 responden dengan persentase 9,5% yang tidak mencantumkan tingkat pendidikannya. Dari tabel diatas, hal ini menunjukkan bahwasanya responden dengan tingkat pendidikan Sarjana (S1) lebih banyak dibandingkan dengan tingkat pendidikan yang lainnya. Dengan tingkat pendidikan yang didominasi oleh Sarjana (S1) ini diharapkan responden telah memiliki pengetahuan akademik yang cukup baik sehingga dapat memahami dengan baik pertanyaan didalam kuesioner yang diberikan.

e. Hasil Pengujian Validitas Instrumen Penelitian

Pengujian validitas dilakukan dengan melakukan korelasi *bivariate* antara masing-masing skor indikator dengan total skor variabel dengan bantuan komputer melalui program *IBM SPSS Statistics Subscription 2020* dengan kriteria sebagai berikut: jika nilai r-hitung lebih besar dari r-tabel dan nilai positif, maka butir atau pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid.

Pengujian reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai *Cronbach Alpha (α)* dengan bantuan *IBM SPSS Statistics Subscription 2020*. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan satu kali pengukuran saja. Suatu konstruk atau variabel dapat dilakukan reliable jika memberikan nilai *Cronbach Alpha (α) > 0,60* (Sunyoto, 2016).

f. Hasil Uji Validitas Variabel Regulasi Keuangan Daerah

Tabel berikut ini menyajikan hasil uji validitas terhadap item pertanyaan latar belakang pendidikan (variabel X_1).

Tabel 5. Hasil Pengujian Validitas Terhadap Item Pertanyaan Regulasi Keuangan Daerah (Variabel X_1)

Item Pertanyaan	r-hitung	r-tabel	Keterangan
1	0.310	0,227	Valid
2	0.666	0,227	Valid
3	0.685	0,227	Valid
4	0.794	0,227	Valid
5	0.717	0,227	Valid
6	0.809	0,227	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (2020)

Berdasarkan dari hasil pengujian pada tabel setiap item pertanyaan menghasilkan koefisien korelasi yang lebih besar dari r-tabel (0,227) yang mana r-tabel diperoleh dari *degree of freedom (df) = n-2*. Dengan kata lain, instrumen penelitian yang berjumlah 6 pertanyaan mengenai variabel regulasi keuangan daerah dalam penelitian ini di nilai telah mampu mengukur apa yang seharusnya diukur

g. Hasil Uji Validitas Variabel Proses pengadaan Barang dan Jasa

Tabel berikut ini menyajikan hasil uji validitas terhadap item pertanyaan proses pengadaan barang dan jasa (variabel X_2).

Tabel 6. Hasil Pengujian Validitas Terhadap Item Pertanyaa Proses Pengadaan Barang dan Jasa (Variabel X_2)

Item Pertanyaan	r-hitung	r-tabel	Keterangan
1	0.490	0,227	Valid
2	0.696	0,227	Valid
3	0.746	0,227	Valid
4	0.713	0,227	Valid
5	0.643	0,227	Valid
6	0.615	0,227	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (2020)

Berdasarkan dari hasil pengujian pada tabel setiap item pertanyaan menghasilkan koefisien korelasi yang lebih besar dari r-tabel (0,227) yang mana r-tabel diperoleh dari *degree of freedom (df) = n-2*.

Dengan kata lain, instrumen penelitian yang berjumlah 6 pertanyaan mengenai variabel proses pengadaan barang dan jasa dalam penelitian ini di nilai telah mampu mengukur apa yang seharusnya diukur.

h. Hasil Uji Validitas Variabel Lingkungan Birokrasi

Tabel berikut ini menyajikan hasil uji validitas terhadap item pertanyaan lingkungan birokrasi (variabel X_3).

Tabel 7. Hasil Pengujian Validitas Terhadap Item Pertanyaan Lingkungan Birokrasi (Variabel X_3)

Item Pertanyaan	r-hitung	r-tabel	Keterangan
1	0.379	0,227	Valid
2	0.414	0,227	Valid
3	0.632	0,227	Valid
4	0.255	0,227	Valid
5	0.747	0,227	Valid
6	0.645	0,227	Valid
7	0.614	0,227	Valid
8	0.649	0,227	Valid
9	0.449	0,227	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (2020)

Berdasarkan dari hasil pengujian pada tabel setiap item pertanyaan menghasilkan koefisien korelasi yang lebih besar dari r-tabel (0,227) yang mana r-tabel diperoleh dari *degree of freedom* (df) = n-2. Dengan kata lain, instrumen penelitian yang berjumlah 9 pertanyaan mengenai variabel lingkungan birokrasi dalam penelitian ini di nilai telah mampu mengukur apa yang seharusnya diukur.

i. Hasil Uji Validitas Variabel Komitmen Organisasi

Tabel berikut ini menyajikan hasil uji validitas terhadap item pertanyaan komitmen organisasi (variabel X_4).

Tabel 8. Hasil Pengujian Validitas Terhadap Item Pertanyaan Komitmen Organisasi (Variabel X_4)

Item Pertanyaan	r-hitung	r-tabel	Keterangan
1	0.761	0,227	Valid
2	0.782	0,227	Valid
3	0.764	0,227	Valid
4	0.556	0,227	Valid
5	0.687	0,227	Valid
6	0.587	0,227	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (2020)

Berdasarkan dari hasil pengujian pada tabel setiap item pertanyaan menghasilkan koefisien korelasi yang lebih besar dari r-tabel (0,227) yang mana r-tabel diperoleh dari *degree of freedom* (df) = n-2. Dengan kata lain, instrumen penelitian yang berjumlah 6 pertanyaan mengenai variabel komitmen organisasi dalam penelitian ini di nilai telah mampu mengukur apa yang seharusnya diukur.

j. Hasil Uji Validitas Variabel Serapan Anggaran

Tabel 9 berikut ini menyajikan hasil uji validitas terhadap item pertanyaan serapan anggaran (variabel Y)

Tabel 9. Hasil Pengujian Validitas Terhadap Item Pertanyaan Serapan Anggaran (Variabel Y)

Item Pertanyaan	r-hitung	r-tabel	Keterangan
1	0.810	0,227	Valid
2	0.782	0,227	Valid

3	0.787	0,227	Valid
4	0.790	0,227	Valid
5	0.632	0,227	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (2020)

Berdasarkan dari hasil pengujian pada tabel setiap item pertanyaan menghasilkan koefisien korelasi yang lebih besar dari r-tabel (0,227) yang mana r-tabel diperoleh dari *degree of freedom* (df) = n-2. Dengan kata lain, instrumen penelitian yang berjumlah 5 pertanyaan mengenai variabel serapan anggaran dalam penelitian ini di nilai telah mampu mengukur apa yang seharusnya diukur.

k. Hasil Ujian Validitas SILPA

Tabel berikut ini menyajikan hasil uji validitas terhadap item pertanyaan SILPA (variabel Z).

Tabel 10. Hasil Pengujian Validitas Terhadap Item Pertanyaan Proses Pengadaan Barang dan Jasa (Variabel X₂)

Item Pertanyaan	r-hitung	r-tabel	Keterangan
1	0.570	0,227	Valid
2	0.612	0,227	Valid
3	0.682	0,227	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (2020)

Berdasarkan dari hasil pengujian pada tabel setiap item pertanyaan menghasilkan koefisien korelasi yang lebih besar dari r-tabel (0,227) yang mana r-tabel diperoleh dari *degree of freedom* (df) = n-2. Dengan kata lain, instrumen penelitian yang berjumlah 3 pertanyaan mengenai variabel SILPA dalam penelitian ini di nilai telah mampu mengukur apa yang seharusnya diukur

l. Hasil Pengujian Reliabilitas Instrumen Penelitian

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk melihat konsistensi suatu pengukuran dari satu variabel. Suatu pengukuran dapat dikatakan dapat diandalkan apabila memiliki koefisien *Cronbach Alpha* lebih dari 0,6 (Sunnyoto, 2016). Berikut ini adalah tabel yang menyajikan hasil uji reliabilitas terhadap instrument yang digunakan dalam penelitian ini.

m. Hasil Pengujian Reliabilitas Terhadap Instrumen Penelitian

Tabel 11. Hasil Pengujian Validitas Terhadap Item Pertanyaan Proses Pengadaan Barang dan Jasa (Variabel X₂)

NO	Variabel	Cronbach Alpha	N of Items
1	Serapan Anggaran (Y)	,803	5
2	Regulasi Keuangan Daerah (X1)	,734	6
3	Proses Pengadaan Barang dan Jasa (X2)	,734	6
4	Lingkungan Birokrasi (X3)	,718	9
5	Komitmen Organisasi (X4)	,728	6
6	SILPA (X5)	,708	3

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (2020)

Berdasarkan hasil uji reliabilitas dari tabel diatas dapat diketahui bahwa seluruh variabel yang digunakan menurut kriteria dinyatakan reliabel, karena memiliki nilai *Cronbach Alpha* lebih dari 0,6. Berdasarkan hasil ini juga dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan dari instrument penelitian teruji reliabilitasnya sehingga dinyatakan reliabel.

n. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua variabel independen atau lebih dengan satu variabel dependen. penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dikarenakan dalam penelitian ini menggunakan 1 variabel dependen yaitu serapan anggaran (Y), dan beberapa variabel independen yaitu Regulasi keuangan daerah (X1), Proses pengadaan barang dan jasa (X2), lingkungan birokrasi (X3), dan Komitmen Organisasi (X4). oleh peneliti, bila peneliti

bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal dua (Sugiyono, 2017). Berikut hasil pengujian regresi linear berganda yang disajikan pada tabel dibawah ini:

o. Hasil Regresi Linear Berganda

Tabel 12. Hasil Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,394	2,597		-,922	,360
	Total_X1	,552	,117	,497	4,723	,010
	Total_X2	,232	,096	,257	2,431	,018
	Total_X3	,141	,075	,177	1,880	,064
	Total_X4	-,018	,091	-,020	-,203	,840

a. Dependent Variable: Total_Y

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (2020)

Berdasarkan tabel di atas, maka diperoleh persamaan regresi berikut ini :

$$Y = 2,394 + 0,552X_1 + 0,232 X_2 + 0,141X_3 + (-) 0,18X_4$$

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Dari persamaan regresi berganda tersebut dapat diinterpretasikan bahwa konstanta sebesar 2,394 memberi arti bahwa apabila Regulasi Keuangan Daerah (X_1), Proses Pengadaan Barang dan Jasa (X_2), Lingkungan Birokrasi (X_3), dan Komitmen Organisasi (X_4) diasumsikan = 0 maka Serapan Anggaran (Y) secara konstanta bernilai 2,394.

Koefisien Regresi variabel Regulasi Keuangan Daerah (X_1) sebesar 0,552 yang artinya bahwasanya Regulasi Keuangan Daerah (X_1) berpengaruh terhadap Serapan Anggaran (Y). Hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel Regulasi Keuangan Daerah meningkat, maka akan terjadi juga peningkatan terhadap variabel Serapan Anggaran (Y) sebesar 0,552.

Koefisien Regresi variabel Proses Pengadaan Barang dan Jasa (X_2) sebesar 0,232 yang artinya bahwasanya Proses Pengadaan Barang dan Jasa (X_2) berpengaruh terhadap Serapan Anggaran (Y). Hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel Proses Pengadaan Barang dan Jasa (X_2) meningkat, maka akan terjadi juga peningkatan terhadap variabel Serapan Anggaran (Y) sebesar 0,232.

Koefisien Regresi variabel Lingkungan Birokrasi (X_3) sebesar 0,141 yang artinya bahwasanya Lingkungan Birokrasi (X_3) berpengaruh terhadap Serapan Anggaran (Y). Hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel Lingkungan Birokrasi (X_3) meningkat, maka akan terjadi juga peningkatan terhadap variabel Serapan Anggaran (Y) sebesar 0,141.

Koefisien Regresi variabel Komitmen Organisasi sebesar - 0,18 yang artinya bahwasanya Komitmen Organisasi (X_4) berpengaruh terhadap Serapan Anggaran (Y). Hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel Komitmen Organisasi (X_4) meningkat, maka akan terjadi juga peningkatan terhadap variabel Serapan Anggaran (Y) sebesar - 0,18.

Didalam penelitian dilakukan pengujian hipotesis yang mana pengujian dilakukan terhadap suatu pertanyaan dengan menggunakan metode statistik sehingga hasil pengujian tersebut dapat dinyatakan signifikan secara statistik. Dalam statistik sebuah hasil bisa dikatakan signifikan secara statistik jika kejadian tersebut hampir tidak mungkin disebabkan oleh faktor yang kebetulan, sesuai dengan batas probabilitas yang sudah ditentukan sebelumnya. Pengujian hipotesis terdiri dari Uji t, Uji f, dan Koefisien Determinasi (R^2). Hasil penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Uji Statistik t

Uji Statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Kuncoro, 2013).

Tabel 13. Uji Statistik t

MODEL	t-tabel	sig
Regulasi Keuangan Daerah (X1)	4,723	,010
Proses Pengadaan Barang dan Jasa (X2)	2,431	,018
Lingkungan Birokrasi (X3)	1,880	,064
Komitmen Organisasi (X4)	-,203	,840

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (2020)

Dari tabel di atas maka hasil pengujian data dari penyebaran kuesioner dapat dijelaskan sebagai berikut:

Koefisien regresi variabel Regulasi keuangan daerah (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,010. Level signifikansi variabel Regulasi keuangan daerah (X1) adalah 0,010 ($< 0,05$). Dan jika dilihat dari t-hitung sebesar 4,723 lebih besar dari t-tabel ($> 2,760$). Dapat disimpulkan bawa variabel Regulasi keuangan daerah (X1) berpengaruh terhadap Serapan Anggaran (Y).

Koefisien regresi variabel Proses pengadaan barang dan jasa (X2) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,018. Level signifikansi variabel Proses pengadaan barang dan jasa (X2) adalah 0,018 ($< 0,05$). Dan jika dilihat dari t-hitung sebesar 2,431 lebih kecil dari t-tabel ($< 2,760$). Dapat disimpulkan bawa variabel Proses pengadaan barang dan jasa (X2) tidak berpengaruh terhadap Serapan Anggaran (Y).

Koefisien regresi variabel Lingkungan birokrasi (X3) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,064. Level signifikansi variabel Lingkungan birokrasi (X3) adalah 0,064 ($> 0,05$). Dan jika dilihat dari t-hitung sebesar 1,880 lebih kecil dari t-tabel ($< 2,760$). Dapat disimpulkan bawa variabel Lingkungan birokrasi (X3) tidak berpengaruh terhadap Serapan Anggaran (Y).

Koefisien regresi variabel Komitmen organisasi (X4) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,840. Level signifikansi variabel Komitmen organisasi (X4) adalah 0,840 ($> 0,05$). Dan jika dilihat dari t-hitung sebesar - 0,203 lebih kecil dari t-tabel ($< 2,760$). Dapat disimpulkan bawa variabel Komitmen organisasi (X4) tidak berpengaruh terhadap Serapan Anggaran (Y).

2) Uji f

Uji F pada dasarnya menunjukkan semua variabel independen atau variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat (Kuncoro, 2013).

Tabel 14. Uji f

MODEL	f-tabel	Sig
Serapan Anggaran (Y)	24,857	,000 ^b

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (2020)

Dari tabel di atas hasil analisis linear berganda menunjukkan menunjukkan bahwasanya Level signifikansi variabel regulasi keuangan daerah, proses pengadaan barang dan jasa, lingkungan birokrasi, dan komitmen organisasi adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ sehingga hasil penelitian ini dapat diterima. Dengan demikian hal ini menyatakan bahwa variabel Regulasi keuangan daerah ,proses pengadaan barang dan jasa, lingkungan birokrasi, dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap serapan anggaran pemerintah.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Regulasi Keuangan Daerah (X1) Berpengaruh Terhadap Serapan Anggaran

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Regulasi keuangan daerah dibuat untuk mengendalikan pelaksanaan keuangan daerah agar segala tindakan atas pengendalian tersebut dapat di tetapkan dalam peraturan. Namun dalam reformasi di bidang keuangan daerah tidak konsistennya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atas pengelolaan keuangan daerah merupakan faktor utama lambatnya akuntabilitas keuangan daerah.

Dalam hasil analisis linear berganda yang telah dilakukan menunjukkan bahwasanya memiliki nilai signifikansi sebesar 0,010 yang lebih kecil dari pada $\alpha = 0,05$. Dan jika dilihat dari t-hitung sebesar 4,723 lebih besar dari t-tabel ($> 2,760$). Hal tersebut dapat disimpulkan bawa variabel Regulasi keuangan daerah (X1) berpengaruh terhadap Serapan Anggaran (Y).

Hasil ini menunjukkan bahwa regulasi keuangan daerah ternyata dapat mempengaruhi serapan anggaran belanja OPD di Provinsi Jambi. Hal ini menunjukkan bahwa adanya regulasi keuangan daerah dapat meningkatkan serapan anggaran OPD. Dalam pelaksanaan anggaran di Provinsi Jambi regulasi keuangan cepat diantisipasi oleh kepala OPD sehingga pelaksanaan anggaran dapat berjalan tepat waktu.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan dalam penelitian Handayani (2015) yang menunjukkan terkadang adanya aturan-aturan yang berubah sangat cepat dan waktu yang tidak terlalu banyak, membuat pemimpin SKPD sebagai pelaksana tidak berani untuk mengimplementasikan kegiatan fisik, karena takut salah dalam pelaksanaannya yang dapat berimplikasi hukum.

4.2.2. Proses Pengadaan Barang dan Jasa (X2) Tidak Berpengaruh Terhadap Serapan Anggaran (Y)

Dalam rangka mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, di dalam Peraturan Presiden memberikan mandat pengadaan barang dan jasa menggunakan layanan pengadaan secara elektronik untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Proses pengadaan barang dan jasa sebelum diberlakukannya secara elektronik memerlukan waktu yang cukup lama dari pengumuman pengadaan hingga pengumuman pemenang lelang, sehingga menjadi salah satu penyebab terlambatnya daya serap anggaran belanja. Terlebih lagi, banyak kasus KKN baik secara administrasi maupun keuangan itu terjadi dalam bidang pengadaan Barang/Jasa pemerintah.

Hasil ini menunjukkan bahwasanya Proses pengadaan barang dan jasa (X2) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,018 Lebih kecil dari pada $\alpha = 0,05$. Dan jika dilihat dari t-hitung sebesar 2,431 lebih kecil dari t-tabel ($< 2,760$). Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya Proses pengadaan barang dan jasa (X2) tidak berpengaruh terhadap Serapan Anggaran (Y). Hal ini dikarenakan proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan yang masih membutuhkan waktu yang lebih banyak dikarenakan pelaksanaan anggaran baru dimulai pada bulan april sehingga jadwal pengadaan barang dan jasa membutuhkan waktu yang panjang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Priatno (2013) dalam penelitiannya pengadaan barang dan jasa yang masih buruk dalam pelaksanaan kegiatan mempunyai kecenderungan memperlambat penyerapan anggaran suatu kerja. Kurangnya kemauan pegawai sebagai panitia pengadaan barang dan jasa dikarenakan tidak sebanding dengan besarnya resiko dan upah yang diterima serta adanya birokrat dalam lingkungan satuan kerja menjadi penyebab buruknya faktor pengadaan barang dan jasa pada satuan kerja.

4.2.3. Lingkungan Birokrasi (X3) Tidak Berpengaruh Terhadap Serapan Anggaran (Y)

Eisenstadt (1959) menyatakan bahwasanya birokrasi merupakan alat atau mekanisme yang dibuat untuk kesuksesan dan efisiensi suatu pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Kondisi atau keadaan yang ada pada pemerintah akan sangat mempengaruhi berjalan lancar atau tidak kegiatan mereka. Semakin baik koordinasi dalam melaksanakan kegiatannya maka akan semakin mudah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ada disatuan kerja.

Hasil ini menunjukkan bahwasanya Lingkungan birokrasi (X3) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,064 lebih besar dari pada $\alpha = 0,05$. Dan jika dilihat dari t-hitung sebesar 1,880 lebih kecil dari t-tabel ($< 2,760$). Dapat disimpulkan bawa variabel Lingkungan birokrasi (X3) tidak berpengaruh terhadap

Serapan Anggaran (Y). Hal ini dikarenakan kurangnya dalam menkoordinasi dalam melaksanakan kegiatan yang ada di satuan kerja.

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Gagola yang menyebutkan bahwa perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, komitmen manajemen, dan lingkungan birokrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Lingkungan birokrasi mempengaruhi penyerapan anggaran dikarenakan adanya dukungan dan kondusifitas kondisi dan keadaan di SKPD dapat mendukung penyerapan anggaran menjadi lebih baik

4.2.4. Komitmen Organisasi (X4) Tidak Berpengaruh Terhadap Serapan Anggaran (Y)

Komitmen organisasi sebagai suatu kelekatan afeksi atau emosi terhadap organisasi seperti individu melakukan identifikasi yang kuat, memilih keterlibatan tinggi, dan senang menjadi bagian dari organisasi. Tidak tercapainya komitmen yang dilakukan melalui perjanjian kerja (PK) dalam melaksanakan APBD, merupakan cerminan dari lemahnya komitmen pemerintah dalam memenuhi kewajibannya dalam mensejahterakan masyarakat.

Hasil ini menunjukkan bahwasanya Komitmen organisasi (X4) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,840 lebih besar dari pada $\alpha = 0,05$. Dan jika dilihat dari t-hitung sebesar $-0,203$ lebih kecil dari t-tabel ($< 2,760$). Dapat disimpulkan bahwa variabel Komitmen organisasi (X4) tidak berpengaruh terhadap Serapan Anggaran (Y). Hal ini dikarenakan kepala OPD tidak konsisten dalam mencapai target kinerja yang telah disepakati bersama kepala daerah yang seharusnya menjadi acuan dalam mewujudkan visi dan misi dari OPD yang dipimpinnya

Hasil penelitian ini sejalan dengan Handayani (2015) bahwasanya komitmen organisasi yang ada di SKPD tidak konsisten terhadap fakta integritas untuk mencapai target kinerja yang sudah ditentukan.

4.2.5. Regulasi Keuangan Daerah (X1), Proses Pengadaan Barang dan Jasa (X2), Lingkungan Birokrasi (X3), dan Komitmen Organisasi (X4) Berpengaruh Terhadap Variabel Dependen yaitu Serapan Anggaran (Y)

Anggaran menurut Mardiasmo merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, dan penganggaran merupakan proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyatakan bahwa anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Mungkin secara umum penyerapan anggaran yang dimaksud adalah pencapaian pemerintah dari suatu estimasi yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada saat tertentu.

Penyerapan anggaran merupakan salah satu tahapan dari siklus anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan dan pengesahan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), penyerapan anggaran, pengawasan anggaran, dan pertanggungjawaban penyerapan anggaran. Tahap penyerapan anggaran ini dimulai ketika Undang-Undang (UU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disahkan oleh DPR. Hasil analisis linear berganda menunjukkan menunjukkan bahwasanya Level signifikansi variabel regulasi keuangan daerah, proses pengadaan barang dan jasa, lingkungan birokrasi, dan komitmen organisasi adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ sehingga hasil penelitian ini dapat diterima. Dengan demikian hal ini menyatakan bahwa variabel Regulasi keuangan daerah, proses pengadaan barang dan jasa, lingkungan birokrasi, dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap serapan anggaran pemerintah.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan pada bab IV, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Regulasi keuangan daerah berpengaruh terhadap serapan anggaran
- 2) Proses pengadaan barang dan jasa tidak berpengaruh terhadap serapan anggaran
- 3) Lingkungan birokrasi tidak berpengaruh terhadap serapan anggaran

- 4) Komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap serapan anggaran
- 5) Regulasi keuangan daerah, proses pengadaan barang dan jasa, lingkungan birokrasi, komitmen organisasi berpengaruh terhadap serapan anggaran

5.2. Saran

Terdapat beberapa keterbatasan yang mungkin dapat mempengaruhi hasil penelitian yang mana diharapkan dapat diatasi pada penelitian berikutnya, antara lain:

- 1) Penelitian ini menggunakan kuesioner sehingga data penelitian yang berasal dari jawaban responden yang disampaikan secara tertulis mungkin mempengaruhi validitas hasil. Jawaban responden secara tertulis belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan akan berbeda jika data diperoleh dengan wawancara secara langsung.
- 2) Penelitian ini hanya membahas variabel-variabel yang berpengaruh terhadap regulasi keuangan daerah, proses pengadaan barang dan jasa, lingkungan birokrasi, dan komitmen organisasi. Dan masih banyak lagi variabel-variabel yang diduga akan mempengaruhi serapan anggaran namun belum dimasukkan pada penelitian ini.

Dari keterbatasan penelitian yang telah diungkapkan maka dapat disarankan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang serapan anggaran disarankan untuk dapat menambah variabel-variabel lainnya yang berhubungan dengan serapan anggaran dan memilih responden yang mengarah kepada pengambilan kebijakan daerah dengan lingkup yang lebih besar.

Peneliti selanjutnya diharapkan selain menerapkan metode survei melalui penyebaran kuesioner juga melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi tambahan serta bagi yang masih melakukan penyebaran kuesioner diharapkan menambah jumlah sampel.

Bagi OPD di Provinsi Jambi diharapkan segera melakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui penyebab penumpukan penyerapan anggaran diakhir tahun agar serapan anggaran dapat terealisasi dan meningkat pada tahun ke tahun.

Diberikan reward kepada OPD yang mampu merealisasikan anggaran diatas target kinerja dan memberikan hukuman kepada OPD yang tidak melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arniwita, Agus Santoso, Endah Tri Kusuma, dan Ahmad Soleh. 2019. *Dampak Penyerapan Anggaran Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus di Provinsi Jambi)*. Jambi. Universitas Muhammadiyah Jambi.
- Eisenstadt, S. N. 1959. Bureaucracy, Bureaucratization, and Debureaucratization. *Administrative Science Quarterly*, 302-320.
- Handayani, CH. 2015. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Serapan Anggaran SKPD di Provinsi Sumatra Utara Tahun 2014-2015 (Tesis). Medan. Universitas Sumatra Utara.
- Heriyanto, Hendry. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Kementrian/Lembaga di Wilayah Jakarta (Tesis). Jakarta. Universitas Indonesia.
- Kuncoro, Mudrajad. 2013. *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*. Edisi 4. Jakarta; Erlangga.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. 2014. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Selamba Empat.
- Priatno, Prasetyo Adi. 2013. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Blitar. Malang. Universitas Brawijaya.
- Repubik Indonesia. *Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 18 tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Bendahara Umum Negara*.

Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.*

Sanusi, Anwar. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis.* Jakarta: Salemba Empat.